

Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme)

LAILATUL QOMARIYAH¹; ERNA SULISTYOWATI²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jln. Rungkut Madya No.01, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294
E-mail : lailatulq067@gmail.com (korespondensi)

Submit : 2021-12-12

Review : 2021-1-10

Publish : 2022-01-26

Abstract: This study aims to determine the application of the principles of good governance and financial management of the YPI Darussalam Cerme foundation with a good governance paradigm. This research is a qualitative research. The results of this study indicate that YPI Darussalam has applied the principles of good governance, but the presentation of financial statements is not in accordance with ISAK 35. The conclusion of this study is that when a non-profit organization applies the principles of good governance, non-profit organizations can develop rapidly and gain people's trust

Keywords: *Good Governance, ISAK 35, Non-Profit Organization*

Tata kelola organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Dewasa ini tidak hanya praktisi pemerintahan dan korporasi saja yang menerapkan prinsip good governance, namun organisasi nirlaba juga dituntut untuk menjadi organisasi yang profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

(Anggara, 2012:209) menyebutkan pentingnya mengimplementasikan prinsip Good governance untuk organisasi nirlaba adalah memperbaiki kinerja dalam menjalankan roda organisasi. Good governance menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen sektor publik untuk menghasilkan suatu manajemen keuangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan efektif yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supermasi hukum di bidang keuangan dan meningkatkan kinerja organisasi. Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat yang madani. Good governance adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,

transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Ramadhan, A.Z., & Suryaningrum, D.H, 2020).

Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa menyampaikan laporan harus adanya standar yang telah diatur. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba diatur dalam ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) No.35 tentang pelaporan entitas nirlaba. Terdapat lima pelaporan keuangan entitas nirlaba yang seharusnya diterapkan demi menunjang akuntabilitas yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Yayasan pendidikan merupakan salah satu badan nirlaba di Indonesia, yayasan pendidikan dibedakan menjadi dua yaitu bergerak di bidang pendidikan

formal dan sektor pendidikan non formal. Secara garis besar tujuan organisasi lembaga pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : memperoleh laba (bisnis) dan yang lainnya adalah nirlaba, baik lembaga pendidikan swasta maupun yang didirikan oleh pemerintah. Yayasan merupakan salah satu contoh dari organisasi nirlaba. Organisasi sektor publik saat ini dituntut untuk mampu mengefisienkan biaya ekonomi maupun biaya sosial yang dikeluarkan untuk suatu aktivitas yang dilakukan.

Sandovi¹, L., & Putra, E.V (2018) melakukan penelitian tentang Implementasi Good Ngo Governance Pada Lembaga Swadaya (LSM) Lokal , menemukan hasil yang bervariasi terhadap penerapan prinsip-prinsip Good governance. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan Good governance masih harus disempurnakan sehingga Good governance bisa digunakan sebagai landasan dalam aktivitas organisasi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, A.Z.,& Suryaningrum, D.H. (2020) dengan meneliti Analisis Penerapan Prinsip Good governance pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba juga menemukan hasil yang perlu diperbaiki serta di sempurnakan sehingga penerapan Good governance bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good governance* pada kinerja keuangan di Yayasan YPI Darussalam Cerme ?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip *Good governance* yang diterapkan di Yayasan YPI Darussalam.

Konsep Good Governance

World Bank mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran

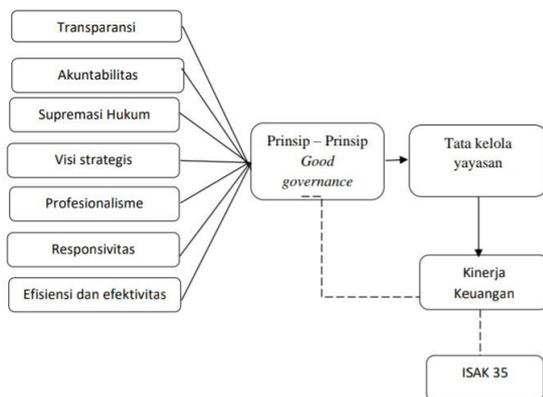
serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank, 1992a).

Prinsip – Prinsip Good Governance

Menurut UNDP (LAN & BPKP, 2000), Prinsip-Prinsip *Good governance* meliputi : *Participation* (Partisipasi), *Rule of law* (Peraturan Hukum), *Transparancy* (Transparansi), *Responsiveness*, *Consensus orientation*, *Equity* (Keadilan/Kesetaraan), *Effectiveness and efficiency* (Efektifitas dan Efisiensi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Strategic vision* (Visi Strategis).

- a. Prinsip Transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- b. Prinsip Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina, 2003).
- c. Prinsip Supremasi Hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Beberapa poin penting untuk bisa mencapai supremasi hukum, bergantung pada bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri.
- d. Prinsip Visi Strategis. Sebuah organisasi yang dikatakan *good governance* dipandang harus memiliki sebuah wawasan ke depan atau visioner, tidak secara teknis organisasional saja, akan tetapi, adanya sosok pemimpin yang visioner juga dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui visi organisasi

- akan terlihat cita-cita organisasi tersebut.
- e. Prinsip Profesionalisme. Dalam menjalankan kegiatan operasional dan program-program berpedoman pada visi dan misi yang melandasi organisasi tersebut, dengan visi dan misi kuat maka misi misi dalam bentuk program akan lebih efektif untuk dilakukan. Dalam mewujudkan *good governance*, harus diterapkan sikap profesional dan sesuai prosedur/standar yang telah disusun. Seorang dikatakan profesional jika dalam melakukan sesuatu pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki.
 - f. Prinsip Responsiveness. Prinsip *responsiveness* (peduli pada stakeholder) dimaksudkan adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
 - g. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas. Organisasi dengan *good governance* adalah organisasi yang dalam pelaksanaan organisasinya selalu dalam perencanaan dan perhitungan yang baik, sehingga apa yang dikerjakan dapat efisien dan efektif.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Meleong (2010) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan dengan

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini informasi data primer diperoleh selama pengamatan langsung (survei lapangan) dan hasil wawancara dengan informan. Kemudian, data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua dan seterusnya. Data sekunder penelitian didapat dari laporan keuangan dan sumber digital atau dokumentasi yang berkaitan dengan Yayasan.

Fokus penelitian ini meliputi Prinsip-Prinsip *Good governance* antara lain: (1) Transparansi yaitu keterbukaan lembaga, penyediaan informasi, kemudahan memperoleh informasi, (2) Akuntabilitas yaitu tanggungjawab lembaga terhadap tugas yang diberikan serta kebijakan atau keputusan yang diambil, (3) Supremasi hukum yaitu keadilan penegakan hukum, serta Hak Asasi Manusia; dan Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat serta Dampak dari Implementasi Prinsip-Prinsip *Good governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi, (4) Responsibilitas yaitu daya tanggap atau kepedulian pada stakeholders, (5) Profesionalisme yaitu kemampuan, keahlian serta moral lembaga dalam melayani masyarakat, (6) Efisiensi dan Efektifitas yaitu pelaksanaan dan pencapaian hasil kinerja lembaga.

Penelitian ini menerapkan strategi *snowbal sampling*. *Snowbal sampling*, dimana dalam penelitian kualitatif ini memiliki peluang fenomena yang diteliti akan dapat berkembang lebih besar dan jumlah subjek penelitian bertambah karena kebutuhan informasi yang belum terpenuhi (Ahmadi, 2016: 92).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan tinjauan literatur. Pengujian keabsahan data ini dilakukan dengan tiga cara yaitu Uji Kredibilitas Data, Uji Transferabilitas, dan Uji Dependabilitas (Reliabilitas).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan (key informan) yang mengetahui berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti memilih informan dalam penelitian ini yaitu para pengurus yang memiliki keterkaitan dan memahami perihal tata kelola dan keuangan yayasan diantaranya ketua umum, sekretaris, bendahara yang bernaung dibawah yayasan.

Dari berbagai data yang ditemukan, peneliti kemudian menganalisis data dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL

Hal tersebut berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa dalam tata kelola yayasan YPI Darussalam teridentifikasi semua prinsip-prinsip *good governance*. Dengan demikian, prinsip-prinsip *good governance* seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, visi strategis, profesionalisme, responsibilitas, efisiensi dan efektivitas apabila diterapkan pada organisasi non profit akan memberikan dampak positif yang mendorong kepada kemajuan organisasi dan dapat meningkatkan kepercayaan organisasi di lingkungan masyarakat.

ISAK 35 belum diterapkan Yayasan dalam menyajikan laporan keuangannya. Namun demikian, Yayasan membuat satu bentuk laporan keuangan bulanan serta laporan tahunan yang sederhana. Secara umum dapat dikatakan tujuan penyusunan laporan pada masjid telah tercapai, yakni menjelaskan pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir, meskipun informasi-informasi yang disajikan belum mendetail.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi pada yayasan ini dilihat dari aspek penyampaian visi, misi, kebijakan yayasan, serta informasi yang dibagikan. Pada aspek penyampaian visi dan misi yayasan, sudah diketahui seluruh

karyawan dan dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang dibuat yayasan sudah disampaikan secara lisan maupun tertulis sehingga seluruh karyawan mengetahui dan harus menerapkan kebijakan yayasan dan setiap satu bulan sekali perusahaan mengadakan rapat yang dimana untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut.

Dalam transparansi penyampaian laporan keuangan yayasan disampaikan dalam rapat dengan pengurus, pengawas, dan kepala dari masing-masing unit sekolah Darussalam namun tidak dipublish secara umum di website, hanya kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Mengenai website pada yayasan, narasumber mengatakan bahwa setiap unit sekolah memiliki website yang sudah dikelola masing-masing namun hanya sebagian yang aktif.

Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas

Pada prinsip akuntabilitas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan dalam yayasan sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam hal pertanggung jawaban keuangan, Kepala sekolah dan bendahara dari setiap unit sekolah melakukan pertanggungjawaban ke Yayasan dengan melaporkan laporan keuangan per semester. Kemudian terkait dengan akuntabilitas ke pemerintah, setiap unit sekolah melaporkan pertanggungjawaban keuangannya pada Kantor Dinas Pendidikan Gresik.

Dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan format atau standar yang telah dibuat oleh yayasan sendiri. Dalam hal ini belum sesuai dengan standar yang berlaku secara umum yaitu ISAK 35. Namun narasumber mengaku tidak ada masalah dalam hal pelaporannya karena sudah bejalan sesuai yang dirancang.

Pelaksanaan Prinsip Supremasi Hukum

Yayasan YPI Darussalam sudah memiliki leglitas hukum sejak tahun 1977. Sebagai yayasan pendidikan, YPI Darussalam sudah mendapat kepercayaan

dari masyarakat sebagai yayasan yang kredibel sehingga mampu berkembang dan membangun 10 unit sekolah serta beberapa unit usaha yang juga bekerja sama dengan pelaku usaha. Yayasan memiliki peraturan yang harus dipatuhi seluruh unsur karyawan dan setiap sekolah memiliki peraturan yang harus dipatuhi seluruh murid. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan sekolah.

Pelaksanaan Prinsip Visi Strategis

Visi dan misi merupakan bagian dari rencana strategis yang berorientasi masa depan. Kemajuan yayasan hingga sampai saat ini tidak lepas dari visi dan misi yang dijalankan. Yayasan YPI Darussalam memiliki visi menjadi yayasan yang maju dan tenar, hal ini relevan dengan prinsip *good governance* yaitu visi strategis. Yayasan YPI Darussalam telah menjadi yayasan yang sudah banyak dikenal dan dipercaya oleh masyarakat.

Pelaksanaan Prinsip Profesionalisme

Yayasan melakukan kegiatan dengan profesional dan sesuai prosedur standar yang telah disusun sebelumnya. Yayasan YPI Darussalam sudah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang wajib dipatuhi seluruh unsur organ yayasan. Berdasarkan evaluasi yayasan, seluruh karyawan sudah menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku.

Pelaksanaan Prinsip Responsibilitas

Responsibility merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan perundang-undangan serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kepedulian masyarakat dan lingkungan disekitar. Seluruh karyawan Yayasan YPI Darussalam sudah menaati peraturan Yayasan yang sudah ada. Yayasan memiliki kegiatan *Qurban* dalam memperingati Hari Raya Idul Adha, yang nantinya daging *Qurban* diberikan kepada seluruh murid sekolah dan karyawan. Hal ini menunjukkan kepedulian Yayasan terhadap seluruh karyawan dan siswa siswi yang bersekolah di Yayasan.

Pelaksanaan Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

Program pada yayasan dirancang berdasarkan visi dan misi tersebut agar sesuai dengan cita-cita dan tujuan organisasi. Karakteristik ini relevan dengan prinsip *good governance* yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Adanya visi dan misi maka program akan lebih terarah sehingga dalam pengimplementasian program akan dapat direncanakan dengan baik sehingga program dapat berjalan efisien dan efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Yayasan YPI Darussalam adalah yayasan pendidikan yang berhasil mengembangkan organisasi sehingga dapat berkembang dengan cepat dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas dikarenakan dalam tata kelola organisasinya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif (III)*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Anggara, Sahya, 2012, *Ilmu Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung.
- Bastian, Indra. 2011. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *ISAK 35. Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Jakarta.
- Krina P, Loina Lalolo. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Kurniasari, Wiwin.2011. *Transparansi Pengelolaan Masjid dengan*

Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 45). *Jurnal Muqtasid*. Vol 2. No. 1, Juli 2011.

LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Keuangan Dasar*. Yogyakarta: BPFE.

Ramadhan, A.Z., & Suryaningrum, D.H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip *Good governance* pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba. *Public Management and Accounting Review*, 1(1), 1-9.

Sandovil, L., & Putra, E.V (2018). Implementasi *Good Ngo Governance* Pada Lembaga Swadaya (LSM) Lokal. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol. 1 No. 4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, tentang Yayasan.

World Bank. 1992a. *Governance and Development*. Washington, DC: World Bank.